

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Alatas, Syed Husein. 1983. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES.
- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2013. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, Chaerul. 2014. *Kejaksaan Memberantas Korupsi*. Jakarta: Deleader.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- _____. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Chazawi, Adami. 1996. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Clarkson dan Keating. 2007. *Criminal Law: Text and Material*. London: Sweet and Maxwell.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga. Jakarta: Balai Pusataka.
- Effendi, Tolib. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya.
- _____. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

- _____. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Cetakan ke-1)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2002. *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2006. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- _____. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga: Jakarta.
- Institute for Criminal Justice Reform. 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Kristian. 2014. *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- _____. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi pasca terbitnya PERMA No.13 tahun 2016*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kuffal, HMA. 2007. *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*. Malang: UMMPress.
- Mas, Marwan. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Merpaung, Laden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Meswati, Elok Dyah dan Laksmi, Brigitta Isworo. 2011. *"Gangren Desentralisasi Korupsi" dalam Korupsi yang Memiskinkan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.

- Muladi dan Priyatno, Dwidja. 1987. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*. PT. Alumni: Bandung.
- _____. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Poernomo, Bambang. 1993. *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam UU RI No. 8 Tahun 1981*. Yogyakarta: Liberty.
- Pohan, Agustina; Susansti, Dwi Siska. 2018. *Panduan Teknik Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK RI.
- Prayitno, Dwidja. 2004. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1977. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenanda Group.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sasangka, Hari dan Rosita, Lily. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sasongko, Hari dan Rosita, Lili. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Sofyan, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Surachmin dan Cahaya, Suhandi. 2015. *Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Susanto, I. S. 1995. *Kejahatan Korporasi*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.

Wiyono, R. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

Sulardi & Wardoyo, Yohana Puspitasari. “Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak”. *Jurnal Yudisial*. Vol.8. No. 3. Desember 2015. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Susanto, Nur Agus. “Dimensi Aksiologis Dari Putusan “ST””. *Jurnal Yudisial*. Vol. 7. No. 3. Desember 2014. Jakarta: Komisi Yudisial Kembali.

Wulur, Nixon. “Keterangan Ahli Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim”. *Lex Crimen*. Vol. VI. No. 2. Mar-Apr 2017.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.